

BAB I PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG MASALAH

Sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai subsistem sosial yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan. Suatu sistem sosial dirumuskan sebagai suatu sistem dari unsur-unsur sosial atau seperti dikemukakan oleh Hugo F. Reading "*the system of social element*" Perumusan arti sistem sosial ini sangat sederhana, dan memerlukan penjelasan yang memadai terutama sistem dan unsur-unsur sosial. Di dalam suatu sistem sosial, paling tidak harus terdapat (1) dua orang atau lebih, (2) terjadi interaksi antara mereka, (3) mempunyai tujuan, dan (4) memiliki struktur, simbol dan harapan-harapan bersama yang dipedomaninya. Unsur-unsur dalam sistem sosial adalah satuan dari interaksi sosial, yang kemudian membentuk struktur, artinya unsur-unsur itu merupakan bagian-bagian yang saling bergantung dan menyatu dalam sistem sosial. Dan sistem sosial pada dasarnya terbentuk dari interaksi antar individu yang berkembang menurut standar penilaian dan kesepakatan bersama, yaitu perpedoman pada norma-norma sosial. Oleh karena itu, di dalam makalah ini, kami akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem sosial, termasuk di dalam makalah ini terdapat pengertian dan unsur-unsur sistem sosial, interaksi sosial, status sosial, nilai dan norma sosial, sosialisasi dan perubahan sosial.

Para pembahas menyebut konsep dan pengertian sistem sosial lebih menekankan pada hubungan-hubungan yang berlangsung antar manusia dan manusia, manusia dan masyarakat, masyarakat dan masyarakat, yang hampir selalu atau bahkan selalu dalam kerangka suatu satuan atau organisasi, sebagai

satuan bersistem yang senantiasa berinteraksi, yakni interaksi sosial – sehingga dapat disebutkan bahwa setiap (satuan) masyarakat adalah bersistem, yang kemudian dikenal dengan sistem sosial (*social system*), yaitu satuan masyarakat yang bersistem, di mana dan kapan pun ia berada, merupakan suatu sistem sosial, yang di dalamnya dapat mengandung subsistem sosial dan dalam pola sistematis yang sangat beragam. Dalam faham fungsionalisme (Parsons, 1951) sistem sosial merupakan sistem interaksi yang berlangsung antara 2 (dua) pelaku atau lebih, yang masing-masing mengandung fungsi dalam suatu satuan masyarakat.

Sistem sosial dapat dipahami sebagai suatu sistem atau pemolaan dari hubungan-hubungan sosial yang terdapat dan berkembang dalam masyarakat tertentu, sebagai wahana fungsional dalam masyarakat tersebut. Dalam pengertian umum demikian, suatu masyarakat atau organisasi sosial atau kelompok, di mana dan kapan pun ia berada, merupakan suatu sistem sosial, yang di dalamnya dapat mengandung subsistem sosial dan dalam pola sistematis yang sangat beragam. Sebagai satuan masyarakat, sistem sosial merupakan sistem yang menjadi wadah bagi totalitas hubungan antara seorang manusia dan manusia lainnya, manusia dan kelompoknya atau kelompok lain, kelompok manusia dan kelompok manusia lainnya, untuk memenuhi hajat, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya, sesuai fungsi masing-masing. Manusia dan kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing secara relatif memiliki batas dan ikatan kewilayahan dan mengembangkan (unsur-unsur) kebudayaannya, termasuk lembaga-lembaganya seperti organisasi-organisasi sosial beserta peraturan-peraturannya yang tertulis dan tak tertulis.

Setiap sistem selalu mengandaikan antara ketertutupan dan keterbukaan, ketertutupan sistem dimaksudkan untuk membedakan dirinya dengan lingkungan, namun ia tidak dapat dipahami sebagai suatu hal yang terisolasi dengan lingkungannya. lingkungan merupakan dunia diluar sistem itu sendiri, ciri utama dari lingkungan adalah kompleksitas atau chaos, dan sistem merupakan reduksi dari lingkungan yang chaos. Untuk memproduksi dan mempertahankan keberlangsungan sistem, ia beroperasi dengan caranya sendiri (*self-reference*). Meskipun ia otonom sebagai suatu sistem tapi tidak autarki (cukup diri). Dengan demikian ia memiliki kanal-kanal untuk mencukupi dirinya dengan berkomunikasi terhadap lingkungan melalui pemaknaan atas batas-batas dirinya sebagai suatu sistem.

Masyarakat dalam sudut pandang Luhmann bukanlah kesatuan moral atau kesatuan konsensus rasional atau komunikatif, masyarakat terbentuk semata-mata berdasarkan proses komunikasi yang terus menerus antara sistem-sistem, dimana identitas sistem ini selalu berubah karena pengaruh dari lingkungan akibat asupan-asupan makna yang terjadi terus menerus, masyarakat dapat dianggap sebagai sistem sosial yang terdiri dari subsistem-subsistem yang menyokong keberadaan sistem sosial tersebut, ia dapat terdiri dari sub-sistem agama, sub-sistem adat, sub-sistem hukum, sub-sistem ekonomi, sub-sistem sains, dan sub-sistem lain yang mempengaruhi dan menyokong sistem sosial. Sehingga dalam sistem sosial terjadi ketidakstabilan atau chaos, karena gangguan dari sub-sistem yang menjadi penyokongnya. Kondisi instabilitas sistem sosial ini pada akhirnya nanti juga dapat mengganggu sub-sistem yang selanjutnya sub-sistem tersebut akan

mereproduksi diri sesuai dengan ciri khas yang merujuk pada dirinya sendiri. gangguan-gangguan ini sama sekali tidak destruktif, justru bila tidak ada gangguan dari lingkungannya, suatu sistem akan kehilangan kapasitasnya untuk beradaptasi dan akhirnya dapat dihancurkan oleh lingkungannya.

Pada sistem sosial setengah jajahan setengah feodal, negara adalah alat kekerasan dari kediktatoran dan kekuasaan kelas. Negara adalah sebuah organ untuk mempertahankan kepentingan kelas-kelas yang berkuasa secara sistematis, dan untuk menindas kelas lainnya. Di dalam masyarakat di mana kelas penghisap mendominasi semua sumber penghidupan, negara adalah sebuah senjata untuk mengamankan dan menegakkan kepentingan kelas penghisap melawan kelas yang terhisap. Pikiran, ide-ide dan kepercayaan dalam masyarakat dari pengalaman dan tindakan rakyat dan produksi, serta dari hubungannya antara orang yang satu dengan lainnya dalam produksi. Di dalam masyarakat berkelas, pikiran setiap orang menunjukkan sebuah kelas tertentu. Pemikiran, ide-ide dan kepercayaan dalam sebuah masyarakat didasarkan pada, mencerminkan dan mewakili kepentingan kelas yang melingkupinya secara ekonomi dan politik.

Kebudayaan dari masyarakat berkelas adalah kebudayaan dari kelas yang memegang kekuasaan ekonomi dan politik. Sebab kelas yang berkuasa mengendalikan lembaga kebudayaan, pikiran mereka, ide dan kepercayaan apa saja yang boleh tersebar kepada seluruh rakyat. Karena itu kelas yang tertindas juga berada di bawah pengaruh kebudayaan kelas yang berkuasa. Patut diingat perubahan fase perpaduan antara feodalisme dengan kolonialisme menjadi hubungan setengah feodalisme dengan kolonialisme adalah mulai lahirnya kelas-

klas penguasa baru yaitu borjuasi komprador yang tadinya tuan tanah besar lokal dan memiliki hubungan sama dengan hal kapitalis birokrat (ass Residen wedana dsbnya) yaitu untuk memenuhi kepentingan imperialis dalam hal pemenuhan bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar, *eksport capital*.

Persekutuan antara imperialisme dan feodalisme telah melahirkan pemerintahan diktator bersama, klas borjuis komparador, tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat setia melayani kepentingan imperialisme. Kemudian Soeharto sebagai rejim pertama yang menjadi rejim boneka paling setia terhadap imperialisme AS. Dan pasca rezim Soeharto pun, sistem setengah feodal dan setengah jajahan masih berlangsung semakin kuat. Sebagai negeri dengan karakter setengah jajahan dan setengah feodal, tetap mempertahankan bentuk penindasan dan penghisapan yang feodal melalui monopoli atas tanah yang melahirkan perampasan tanah-tanah kaum tani secara paksa melalui instrusmen pemerintahan kaki tangan untuk kepentingan imperialisme dan feodalisme. Di mana ada penindas, di situ ada yang tertindas. Rakyat Indonesia yang dapat dikategorikan tertindas adalah mereka yang selama ini dirugikan, dihambat, dihisap oleh hubungan produksi SJSF di bawah dominasi imperialisme.

<http://www.pp-frontmahasiswaasional.org/2020/05/pidato-politik-ketua-umum-fmn.html> [diakses tanggal 17 Juni 2020]

Perempuan. Dalam sistem setengah jajahan dan setengah feodal, kaum perempuan mengalami penindasan berlipat ganda. Di lapangan ekonomi, adanya diskriminasi jenis kelamin dalam kerja produksi. Misalnya sistem pengupahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dan tidak dipenuhinya hak natural

kaum perempuan seperti haid, hamil, dan melahirkan. Di lapangan politik, pemerintahan Rezim Boneka Imperialis telah menghambat keterlibatan kaum perempuan dalam gelanggang politik untuk memperjuangkan hak-hak dan pembebasannya. pekerja lainnya. Atau di lingkungan kampus, masih memandang rendah atau tidak pantas keterlibatan perempuan dalam berorganisasi dan berjuang, yang menganggap bahwa itu adalah pekerjaan dari laki-laki. Sementara di lapangan budaya, warisan lama feodal-patriarkal dan tidak hilang bahkan semakin menguat dan bercampur dengan budaya liberal machoisme imperialis yang reaksioner. Sehingga perempuan masih mengalami diskriminasi baik untuk menentukan nasibnya.

<http://www.seruni.org/2020/05/justice-for-anis-galang-solidaritas.html>

Terhadap kebutuhan perempuan telah membuat perempuan sering kali menjadi korban dari kebijakan tersebut. Lemahnya perlindungan hukum terhadap kaum perempuan, secara tidak langsung juga telah menempatkan posisi perempuan menjadi termarginalisasikan. Aspek historis dan budaya menempatkan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan melalui hubungan kekuasaan bersifat patriarkal, baik secara personal maupun melalui pengaturan negara.

<http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/66158/potongan/S2-2013-306599-chapter1.pdf>

Munculnya klas Semi Proletariat merupakan kumpulan masyarakat yang lahir dari sistem setengah jajahan-setengah feodal. Sebagian besar mereka tidak memiliki mata pencaharian atau serba berkurangan akibat keterbelakangan desa dan pertumbuhan industri dalam negeri yang kerdil. Semi-proletariat bukanlah

bagian atau pun tingkatan dalam proletariat. Mereka hanya memiliki sebagian ciri-ciri proletariat yakni menjual tenaga kerjanya dan tidak memiliki alat kerja dalam produksi.

Lumpen proletariat adalah kelas dalam masyarakat Indonesia yang karena keterbelakangan kesadarannya bergantung hidup dari berbagai aktivitas kejahatan atau kriminal yang anti sosial. Seperti pencurian, pemerasan, pencopetan, penjambretan, penodongan, perampokan, dan pelacuran serta hidup dari penjualan obat narkotika.

Kepemilikan perseorangan atas tanah dan budak pada akhirnya mencapai puncaknya dan melahirkan kontradiksi pokok antar si budak dengan para tuan budak di mana-mana. Hal ini direspon oleh para tuan budak dengan membebaskan secara relatif budak dan memperlonggar beban kerja serta memperbaiki kualitas hidup (makanan dan pakaian). Secara bersamaan tuan budak memperkuat dirinya dengan membangun suprastruktur kekuasaan lokal dengan mengangkat dirinya sebagai raja di sebuah wilayah. Kemudian mempekerjakan budak-budak yang memiliki kebebasan secara relatif di atas tanah dan juga membangun kekuatan militer atau prajurit, yang dipimpin oleh para tukang pukul dan anak-anak tuan budak. Inilah yang menjadi awal mula munculnya kerajaan-kerajaan lokal dan kecil di Indonesia. Proses pergeseran hubungan produksi ini menandai lahirnya era transisi menuju feodalisme yang nanti akan disempurnakan oleh kolonialisme Belanda di Indonesia. www.agraindonesia.org

Perkembangan perfilman akan membawa dampak yang cukup besar dalam perubahan sosial masyarakat. Perubahan tersebut di sebabkan oleh semakin

bervariasi proses penyampaian pesan tentang realitas obyektif dan representasi yang ada terhadap realitas tersebut secara simbolik serta sebuah kondisi yang berbeda. Film sebagai salah satu jenis media massa menjadi sebuah saluran bagi bermacam ide, gagasan, konsep serta dapat memunculkan pluralitas efek dari penayangannya yang akhirnya mengarah pada perubahan pada masyarakat. Efek pesan yang ditimbulkan pada film dalam kemasan realitas simbolik ada yang secara langsung dirasakan pada khalayaknya bisa jadi perubahan emosi namun ada pula yang berdampak jangka panjang seperti perubahan gaya hidup, idealisme atau malah ideologi.

http://eprints.ums.ac.id/26946/2/BAB_I.pdf [diakses tanggal 15 agustus 2020]

Film sebagai salah satu bentuk media massa mempunyai peran penting dalam sosialkultural, artistik, politik dan dunia ilmiah. Pemanfaatan film dalam pembelajaran masyarakat ini sebagian didasari oleh pertimbangan bahwa film mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian orang dan sebagian lagi didasari oleh alasan bahwa film mempunyai kemampuan mengantar pesan secara unik (McQuai, 1997). Selain itu juga film merupakan salah satu media hiburan yang murah dan sederhana.

Film “Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak”(2017) mengangkat isu yang berbeda dari film-film yang melibatkan perempuan sebagai tokoh sehingga menarik perhatian peneliti. Film ini bercerita tentang tokoh Marlina yang ditindas oleh kawanan perampok yang ingin merampok dan memperkosa diri Marlina. Dominasi patriarki disimbolkan dengan kawanan perampok yang seluruh anggotanya adalah laki-laki. Sejak awal cerita dominasi laki-laki telah

ditunjukkan melalui kehadiran tokoh Markus yang datang ke rumah Marlina dan memberi tahu bahwa nanti dia akan dirampok dan secara sepihak Markus mengatakan bahwa jika masih sempat dia juga akan tidur dengan tujuh kawanannya perampok. Sebuah ironi yang berusaha ditampilkan pembuat film bahwa perempuan telah kehilangan hak atas dirinya. Meskipun seorang diri Marlina tidak takut pada para perampok, ia justru menyusun rencana untuk membasmi para perampok. Singkat cerita Marlina berhasil membunuh sebagian besar kawanannya perampok dengan racun di makanan, dan golok yang menyebabkan kepala ketua perampok terpenggal. Marlina ingin melaporkan kejahatan para perampok kepada polisi dengan harapan Marlina mendapatkan perlindungan hukum.

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1137419&val=4687&title=PEMAKNAAN%20KHALAYAK%20TERHADAP%20FILM%20MARLINA%20SI%20PEMBUNUH%20DALAM%20EMPAT%20BABAK>

Dimulailah perjalanan Marlina dalam menebus keadilan yang terbagi dalam empat babak yaitu perampokan, perjalanan, pengakuan, dan kelahiran. Secara keseluruhan, Marlina Pembunuh dalam Empat Babak mengisahkan tentang keberanian dan peran wanita dalam kehidupan, ditambah dengan masih banyaknya laki-laki yang mengobjektifikasi perempuan dan merasa lebih superior. Tidak hanya Marlina, temannya yang bernama Novi (Dea Panendra) yang tengah hamil 10 bulan tetapi tidak kunjung melahirkan juga ikut meramaikan film ini.

(<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20171114150650-220-255562/ulasan-film-Marlina-si-pembunuh-dalam-empat-babak>).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang fenomena yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat di simpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana representasi “Sistem Sosial Setengah Jajahan Setengah Feodal” dalam film Marlina pembunuh dalam empat babak?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan teoritis

Untuk mengetahui representasi Sistem Sosial Setengah Jajahan Setengah Feodal yang terjadi di Indonesia dalam Film Marlina Pembunuh Dalam Empat Babak terkhusus di provinsi Nusa Tenggara Timur Kepulauan Sumba sebagai latar tempat dalam film tersebut.

2. Tujuan praktis

Untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam rangka penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Mumammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu komunikasi tentang representasi sistem sosial Setengah Jajahan Setengah Feodal
- b. Sebagai dasar menambah wawasan dan pengetahuan Penulis

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi secara teori untuk memahami sistem Setengah Jajahan Setengah Feodal di negara berkembang seperti Indonesia.

E. Kerangka Teori/ Kajian Teori

1.1 TEORI REPRESENTASI

Teori Representasi (*Theory of Representation*) yang dikemukakan oleh Stuart Hall menjadi teori utama yang melandasi penelitian ini. Pemahaman utama dari teori representasi adalah penggunaan bahasa (*language*) untuk menyampaikan sesuatu yang berarti (*meaningful*) kepada orang lain. Representasi adalah bagian terpenting dari proses dimana arti (*meaning*) diproduksi dan dipertukarkan antara anggota kelompok dalam sebuah kebudayaan (*culture*). Representasi adalah mengartikan konsep (*concept*) yang ada di pikiran kita dengan menggunakan bahasa. Stuart Hall secara tegas mengartikan representasi sebagai proses produksi arti dengan menggunakan bahasa.

Sementara *the Shorter Oxford English Dictionary* membuat dua pengertian yang relevan yaitu : (A) Merepresentasikan sesuatu adalah mendeskripsikannya,

memunculkan gambaran atau imajinasi dalam benak kita, menempatkan kemiripan dari obyek dalam pikiran/ indera kita; (B) Merepresentasikan sesuatu adalah menyimbolkan, mencontohkan, menempatkan sesuatu, penggantian sesuatu, seperti dalam kalimat ini; bagi umat Kristen, Salib merepresentasikan penderitaan dan penyalipan Yesus. Teori representasi sendiri dibagi dalam tiga teori atau pendekatan yaitu (1) *Reflective approach* yang menjelaskan bahwa bahasa berfungsi seperti cermin yang merefleksikan arti yang sebenarnya. Di abad ke-4 SM, bangsa Yunani mengistilahkannya sebagai *mimetic*. Misalnya, mawar ya berarti mawar, tidak ada arti lain. (2) *Intentional approach*, dimana bahasa digunakan mengekspresikan arti personal dari seseorang penulis, pelukis, dll. Pendekatan ini memiliki kelemahan, karena menganggap bahasa sebagai permainan privat (*private games*) sementara disisi lain menyebutkan bahwa esensi bahasa alah berkomunikasi didasarkan pada kode-kode yang telah menjadi konvensi di masyarakat bukan kode pribadi. (3) *Constructionist approach* yaitu pendekatan yang menggunakan sistem bahasa (*language*) atau sistem apapun untuk merepresentasikan konsep kita (*concept*). Pendekatan ini tidak berarti bahwa kita mengkonstruksi arti (*meaning*) dengan menggunakan sistem representasi (*concept dan signs*), namun lebih pada pendekatan yang bertujuan mengartikan suatu bahasa (*language*). Contoh model ketiga ini adalah *Semiotic approach* yang dipengaruhi oleh ahli bahasa dari Swiss, Ferdinand de Saussure dan *Discursive approach* oleh filosof Perancis bernama Micheal Foucault. Meskipun pendekatan *constructionist approach* menjadi dasar pemikiran penelitian ini, namun pendekatan *semiotic* dan *discursive* tidak digunakan dalam

penelitian ini karena metode yang digunakan adalah *framing*. Relevansi utama dari teori konstruktionis terhadap penelitian adalah tentang penjelasan bahwa bahasa (*language*) yang terdapat dalam berita berupa kumpulan dari *signs* (artikel, foto, video, kalimat) memiliki arti (*meaning*) yang merepresentasikan budaya (*culture*) yang ada di masyarakat kita, termasuk media. Untuk lebih memperjelas tentang teori representasi, maka perlu diperjelas tentang berbagai komponen terkait seperti bahasa (*language*), arti (*meaning*), konsep (*concept*), tanda-tanda (*signs*), dan lain-lain.

Representasi menghubungkan antara konsep (*concept*) dalam benak kita dengan menggunakan bahasa yang memungkinkan kita untuk mengartikan benda, orang atau kejadian yang nyata (*real*), dan dunia imajinasi dari obyek, orang, benda dan kejadian. Yang tidak nyata (*fictional*). Berbagai istilah itu muncul dalam bahasan selanjutnya yaitu sistem representasi (*sistem of representation*). Terdapat dua proses dalam sistem representasi yaitu; pertama, representasi mental (*mental representation*) dimana semua obyek, orang dan kejadian dikorelasikan dengan seperangkat konsep yang dibawa kemana-mana di dalam kepala kita. Tanpa konsep, kita sama sekali tidak bisa mengartikan apapun di dunia ini. Disini, bisa dikatakan bahwa arti (*meaning*) tergantung pada semua sistem konsep (*the conceptual map*) yang terbentuk dalam benak milik kita, yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan dunia dan memungkinkan kita untuk bisa mengartikan benda baik dalam benak maupun di luar benak kita. Kedua, bahasa (*language*) yang melibatkan semua proses dari konstruksi arti (*meaning*). Konsep yang ada di benak kita harus diterjemahkan dalam bahasa universal, sehingga kita bisa

menghungkan kensep dan ide kita dengan bahasa tertulis, bahasa tubuh, bahasa oral maupun foto maupun visual (*signs*).Tanda-tanda (*signs*) itulah yang merepresentasikan konsep yang kita bawa kemana-mana di kepala kita dan secara bersama-sama membentuk sistem arti (*meaning system*) dalam kebudayaan (*culture*) kita. (Hasfin,13:2011).

1.2 SEJARAH PERKEMBANGAN MEDIA FILM DAN KEKUASAAN

Kekuasaan bisa saja bermula dari moncong senjata tetapi ia akan menjadi agung lewat bidikan kamera. Melalui kamera kekuasaan takhtanya punya daya paksa tetapi sekaligus daya pakau. Ini karena seperti didedahkan Bill Nichols (1982), menonton adalah mempercayai,tetapi tak semua yang tampak diperlakukan sama di mata kamera. "Kamera tak bisa berdusta. Tetapi ia mungkin bisa menjadi aksesori bagi ketidakbenaran" ujar Harold Evans (*Encarta Book of Quotations*,1999) seorang penerbit dan editor surat kabar terkemuka Amerika suatu kali. Sinema yang menuliskan realitas lewat mata kamera, tak luput dari kebenaran proposisi ini. Joseph Goebbels, sang arsitek propaganda Hitler, bahkan telah lama mempercayai sinema tak hanya memiliki fungsi hiburan semata, tetapi juga instrumen yang mampu menggerakkan massa.

Sejak kelahirannya film telah meledakkan kecemasan baru lantaran kehadirannya menyihir perhatian orang kebanyakan. Tatkala film pertama kali dipertontonkan secara komersial pada 28 Desember 1895 di Grand Cafe di Boulevard de Capucines No. 14 Perancis, penonton terkaget-kaget kagum dan riuh. Bagaimanapun terpaan film pertama kali pada penonton telah mengundang

beragam respon, adonan antara kekaguman dan kecemasan. *Luis Bunuel*, sutradara Perancis terkemuka, dalam otobiografinya *My Sigh* pernah membandingkan film awal dengan taman hiburan.

Seiak itu film melesat dari statusnya sebagai hiburan kaum pekerja kelas bawah perkotaan di saat senggang menjadi tontonan yang mampu merelatifkan batas-batas kelas. Akibatnya, film menjadi bisnis yang gampang menanggung keuntungan. Kemampuan film untuk menyedot perhatian massa dan sekaligus mendatangkan uang, tak pelak, mencuatkan potensi film yang lain: sebagai alat propaganda. Kita tentu tak lupa pada ungkapan Lenin yang tersohor, "Di antara berbagai kesenian, bagi kita, sinema adalah yang terpenting." Begitu pula Goebbels, yang telah disinggung di muka, menyebut film sebagai "salah satu dari media modern dan berjangkauan luas yang mampu mempengaruhi massa" (Chapman, 2000:683).

Keberadaan film propaganda tidak hanya karena kekuasaan di luar film yang hendak memeralatnya tetapi karakterfilm itu sendiri merupakan medium propaganda yang sempurna. Dengan kata lain, film bisa menjadi medium untuk membangun kekuasaan dan lewat film pula sesungguhnya kekuasaan terukir dengan jelas. Menggunakan istilah dari khasanah semiotika (ilmu tentang tanda dan hubungan antartanda), film merupakan "ikonografi" kekuasaan. Ikonografi berasal dari kata "ikon" yang berarti penanda (*signifier*) yang mempunyai kemiripan dengan yang ditandai (*signified*). Dalam praktik keagamaan misalnya, ikonografi lazimnya berujud benda-benda yang disakralkan atau disucikan yang mewakili keberadaan kekuatan Ilahiah. Sementara itu, kekuasaan dalam tulisan

ini mengacu ada proses pengorganisasian wacana (*discourse*) dan kekuatan yang berperan dalam praktik pemaknaan (signifikasi) lewat beragam media representasi, termasuk film.

Dalam sejarah sinema dunia lazimnya kita kenal beberapa film yang dicatat sebagai tonggak penting film propaganda, *Birth of Nations* (1916) karya D.W Griffith, *Battleship Potemkin* (1926) karya Sergei Eisenstein, *Triumph of the Will* (1934) karya Leni Reifenstahl dan *War Games* (1965) karya Peter Watkins. Film-film ini secara gamblang menunjukkan model propaganda sederhana yang bersifat hitam-putih. Hitam didefinisikan sebagai "masalah, kebingungan dan terror", sedangkan yang putih didefinisikan sebagai "kesederhanaan, kejelasan dan repetisi".

Film propaganda memang lazimnya mengambil bentuk dokumenter untuk meyakinkan penonton terhadap sudut pandang politik tertentu. Tentu saja, film propaganda tak hanya terbatas pada film non-fiksi. Beberapa film drama perang pada era 1940-an di Amerika diproduksi untuk menggalang konsensus siapa yang disebut 'musuh'. Salah satu konvensi penting genre film pada periode itu adalah berbagai bagian terpisah-pisah yang berhimpun bersama menyumbang bagi kebijakan negara. Tak aneh, jika film propaganda pertama pada periode itu adalah *The Birth of Nations* (1916) karya D.W Griffith.

Pada era-Hitler, peran Joseph Goebbels sebagai menteri propaganda sangat menentukan. Di tangan Goebbels partai Nazi dan Hitler disulap dalam citra yang gemilang. Belajar dari berbagai genre film-film Hollywood yang sukses,

agaknya ambisi dasar rezim Nazi adalah menciptakan mesin impian ala Hollywood dalam versi Nazi.

1.3 TEORI SISTEM SOSIAL TALCOT PARSONS

Sepanjang kariernya yang panjang, Talcott Parsons adalah kontributor produktif untuk literatur sosiologis. Kepentingannya berkisar jauh dan luas. Dalam kerangka umum teori *grand* masyarakat, ia berurusan dengan subsistem, peran, urutan normatif, dan interpretasi situasi oleh aktor-aktor sosial. Pada saat-saat yang berbeda, ia menjelajahi masalah sosiologi medis, perkembangan sosial kepribadian, ekstremisme politik, universitas, dan kekeluargaan. Karya-karyanya: Struktur Aksi Sosial (1937), Sistem Sosial (1951), Menuju Teori Umum Aksi (dengan Edward Shils, 1951), Struktur Sosial dan Kepribadian (1964), dan Sistem Modern Societies (1971). Secara keseluruhan, Parsons mengembangkan sistem teoritis berpusat konseptual dalam kesetimbangan, *universalities evolusi*, dan identifikasi properti yang umum untuk semua masyarakat. Dalam teorinya, evolusi sosial sejajar evolusi biologis, dengan masyarakat modern membuktikan lebih besar "kapasitas adaptif umum" dari yang sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat tidak kurang suatu sistem daripada rekan-rekan biologis dan alami. Untuk Parsons, sistem sosial telah pindah historis terhadap adaptasi yang lebih besar (penyesuaian yang menjaga ketertiban sistemik), diferensiasi (spesialisasi lembaga sosial dan pembagian kerja), *upgrade* (kebebasan yang lebih besar dari keinginan), inklusi (keragaman normatif), dan nilai generalisasi (nilai-nilai yang lebih

mencerminkan kebutuhan sistem yang semakin kompleks) (Turner, 30-42:1998).

Struktur Aksi Sosial, Parsons menganjurkan menggunakan "realisme analitis" untuk membangun teori sosiologi. Teori sosiologi harus menggunakan sejumlah konsep penting yang "memadai 'genggaman' aspek dunia luar. Konsep-konsep ini tidak sesuai dengan fenomena konkret, tetapi untuk unsur-unsur di dalamnya yang analitis dapat dipisahkan dari unsur-unsur lain. Dengan demikian, pertama, teori harus melibatkan pengembangan konsep-konsep yang abstrak dari realitas empiris, dalam semua keragaman dan kebingungan, unsur analitis umumnya. Dengan cara ini, konsep akan mengisolasi fenomena dari *embeddedness* mereka dalam hubungan yang kompleks yang merupakan realitas sosial. Fitur unik dari realisme analitis Parsons adalah desakan tentang bagaimana konsep-konsep abstrak yang akan digunakan dalam analisis sosiologis. Dengan demikian, seperti Weber, Parsons percaya bahwa teori harus awalnya menyerupai klasifikasi rumit dan kategorisasi gejala sosial yang mencerminkan fitur yang signifikan dalam organisasi ini fenomena sosial. Strategi ini terbukti di Parsons karya besar pertama, di mana dia mengembangkan "teori voluntaristik tindakan." Parsons percaya bahwa "teori voluntaristik tindakan" mewakili sintesis asumsi berguna dan konsep utilitarianisme, positivisme, dan idealisme. Dalam meninjau pemikiran ekonom klasik, Parsons mencatat *excessiveness* utilitarianisme mereka: aktor diatur dan atomistik dalam pasar bebas dan kompetitif rasional mencoba untuk memilih perilaku-perilaku yang akan memaksimalkan keuntungan mereka dalam transaksinya dengan orang lain.

Parsons percaya formulasi seperti tatanan sosial disajikan beberapa masalah penting: Apakah manusia selalu berperilaku rasional? Apakah mereka memang bebas dan tidak diatur? Bagaimana mungkin dalam rangka sistem yang tidak diatur dan kompetitif? Namun Parsons melihat beberapa fitur sebagai buah pemikiran utilitarian, terutama perhatian dengan aktor seperti mencari tujuan dan penekanan pada kapasitas membuat pilihan-manusia yang berat garis alternatif tindakan.

Dalam sikap kritis yang sama, Parsons menolak formulasi ekstrim positivis radikal, yang cenderung untuk melihat dunia sosial dalam hal hubungan sebab-akibat antara diamati fenomena fisik. Dengan demikian, ia merasa, mereka mengabaikan fungsi simbolis yang kompleks dari pikiran manusia. Selanjutnya, Parsons melihat penekanan pada hubungan sebab-akibat yang dapat diamati karena terlalu mudah mendorong urutan reduksionisme tak terbatas: kelompok dikurangi menjadi hubungan kausal anggota masing-masing; individu yang direduksi menjadi hubungan sebab-akibat dari proses fisiologis mereka; ini adalah direduksi menjadi hubungan fisika-kimia, dan seterusnya, sampai ke hubungan sebab-akibat yang paling dasar di antara partikel materi fisik. Namun demikian, meskipun ekstrem ini, positivisme radikal menarik perhatian pada parameter fisik kehidupan sosial dan dampak deterministik parameter ini pada banyak tapi tentu saja tidak semua organisasi sosial. Akhirnya, dalam menilai idealisme, Parsons melihat konsepsi "ide" untuk membatasi kedua proses individu dan sosial berguna, meskipun semua terlalu sering ide-ide ini dipandang sebagai terpisah dari kehidupan sosial yang sedang berlangsung yang seharusnya

mereka mengatur. Kedalaman dalam analisis Parsons dari tradisi ini adalah mustahil untuk berkomunikasi. Lebih penting dari rincian analisisnya adalah tenun konsep yang dipilih dari masing-masing tradisi ini menjadi sebuah teori voluntaristik tindakan. Pada titik awal ini, sesuai dengan strategi teori gedungnya, Parsons mulai membangun sebuah teori fungsional organisasi sosial. Dalam formulasi awal ini, ia dikonseptualisasikan kesukarelaan sebagai subjektif proses pengambilan keputusan aktor individual, namun ia memandang keputusan seperti hasil parsial dari beberapa jenis kendala, baik normatif dan situasional. Oleh karena itu, tindakan voluntaristik melibatkan unsur-unsur dasar: (1) Pelaku, pada saat ini dalam pemikiran Parsons, adalah orang-orang individu. (2) Aktor dipandang sebagai *goal seeking*. (3) Pelaku juga proses cara alternatif untuk mencapai tujuan. (4) Pelaku dihadapkan dengan berbagai kondisi situasional, seperti makeup mereka sendiri biologis dan keturunan serta berbagai kendala ekologi eksternal yang mempengaruhi pemilihan tujuan dan sarana. (5) Aktor diatur oleh nilai-nilai, norma, dan ide-ide lain sehingga ide-ide ini mempengaruhi apa yang dianggap sebagai tujuan dan apa artinya dipilih untuk mencapainya. (6) Aksi melibatkan aktor membuat keputusan subjektif tentang cara untuk mencapai tujuan, yang semuanya dibatasi oleh gagasan dan kondisi situasional.

Sistem Sosial dan Menuju Teori Umum Aksi Selama akhir 1940-an dan awal 1950-an Parsons bekerja sangat keras pada memproduksi beberapa pernyataan teoritis utama. Di 1951 Parsons menerbitkan dua karya teoritis utama, Sistem Sosial 1 dan Menuju Teori Umum Aksi. Karya terakhir yang

ditulis bersama dengan Edward Tolman, Edward Shils dan beberapa orang lain, adalah hasil dari apa yang disebut Carnegie, seminar yang telah terjadi pada periode September 1949 dan Januari 1950. Sistem Sosial diwakili Parsons upaya besar pertama untuk menyajikan garis dasar tentang teori umum masyarakat, karena Struktur Aksi Sosial (1937) dapat dianggap sebagai pekerjaan, di mana ia membahas dasar prinsip metodologis dan meta-teoritis untuk teori semacam itu. Sistem Sosial berusaha untuk menyajikan umum teori sistem sosial membangun sistematis dari itu tempat yang paling dasar dan karenanya, itu menampilkan ide interaksi Situasi berdasarkan kebutuhan-disposisi dan difasilitasi melalui konsep-konsep dasar kognitif, cathectic dan evaluatif orientasi. Dengan cara yang sama pekerjaan juga menjadi terkenal karena tempat, di mana Parsons memperkenalkan variabel pola, yang pada kenyataannya mewakili pilihan didistribusikan sepanjang *Gemeinschaft* dibandingkan *Gesellschaft* sumbu. Namun, pemikiran seperti Parsons 'tentang garis besar dari sistem sosial pergi melalui serangkaian cepat *re-editing* proses di tahun-tahun Selama awal 1950-an gagasan model AGIL berlangsung bertahap di Parsons pikiran. Menurut Parsons ide kunci untuk skema AGIL dipicu selama Bekerja Parsons dengan Robert F. Bales pada studi proses motivasi dalam kelompok-kelompok kecil Parsons dilakukan ini ide menjadi pekerjaan utama, ia menulis dengan muridnya Neil Smelser, yang diterbitkan pada tahun 1956 dengan judul Ekonomi dan Masyarakat, di mana model dasar pertama dari skema AGIL disajikan.

Konsep dasar variabel pola dalam cara baru dan disajikan solusi dalam sistem-teoritis pendekatan menggunakan gagasan hirarki *cybernetic* sebagai

prinsip pengorganisasian. Inovasi nyata dalam model AGIL adalah konsep "fungsi laten" atau fungsi pemeliharaan pola, yang menjadi kunci penting untuk hirarki *cybernetic* seluruh. Selama perkembangan teoritis Parsons menunjukkan minat yang terus-menerus dalam simbolism. Sebuah pernyataan penting dalam hal ini adalah artikel Parsons "Teori simbolisme dalam kaitannya dengan tindakan. Struktural Fungsional Teori Fungsionalisme struktural menekankan pada keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Dalam perspektif Fungsionalis, suatu masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat.

Teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Dengan demikian seperti halnya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras bahkan kemiskinan "diperlukan" dalam suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan dan walaupun terjadi suatu konflik maka penganut teori ini memusatkan perhatian kepada masalah bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut agar masyarakat kembali menuju suatu keseimbangan. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan kearah keseimbangan, yaitu suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang. Perubahan sosial mengganggu keseimbangan

masyarakat yang stabil, namun tidak lama kemudian terjadi keseimbangan baru. Nilai atau kejadian pada suatu waktu atau tempat dapat menjadi fungsional atau disfungsional pada saat dan tempat yang berbeda. Bila suatu perubahan sosial tertentu mempromosikan suatu keseimbangan yang serasi, hal tersebut dianggap fungsional bila perubahan sosial tersebut mengganggu keseimbangan, hal tersebut merupakan gangguan fungsional, bila perubahan sosial tidak membawa pengaruh, maka hal tersebut tidak fungsional.

Gagasan mengenai fungsi berguna agar kita terus mengamati apa yang disumbangkan oleh suatu bagian dari struktur terhadap sistem yang dianalisis atau lebih tepatnya, apa fungsi yang dijalankan dalam sistem itu. Masyarakat adalah organisme yang tidak berdiri sendiri, melainkan bergabung dengan kelompoknya dalam sistem pembagian tugas, yang dalam kenyataannya berkaitan dengan jenis-jenis norma atau peraturan sosial yang mengikat individu pada keadaan sosialnya. Merton menolak postulat-postulat fungsionalisme struktural yang masih mentah yang menyebarkan paham. Kesatuan masyarakat yang fungsional Postulat ini berpendirian bahwa semua keyakinan dan praktik kultural dan sosial yang sudah baku adalah fungsional untuk masyarakat sebagai satu kesatuan maupun untuk individu atau masyarakat. Pandangan ini secara tersirat menyatakan bahwa berbagai sistem sosial pasti menunjukkan integrasi tingkat tinggi. Kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Tapi menurut

Merton, hal itu bisa benar terjadi dalam masyarakat primitive yang kecil, generalisasi itu tidak dapat diperluas kepada masyarakat-masyarakat yang lebih besar jumlahnya dan lebih kompleks. (Hunt, 18:1930)

2.1 MATERIALISME HISTORIS DAN SEJARAH PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Dalam ilmu sosial, ada beragam metode analisis sosial. Tiap metode memiliki asumsi-asumsi teoritis tertentu tentang hakikat dasar masyarakat (ontologi sosial). Demikian pula dengan Marxisme sebagai metode analisis sosial. Asumsi ontologi sosial dari metode analisis Marxis adalah materialisme historis. Di sini, kita akan membahas dua komponen pokok materialisme historis, yaitu *pertama*, teori tentang hubungan antara masyarakat/struktur sosial dengan individu/agensi, dan *kedua*, teori tentang relasi antara infrastruktur (ekonomi) dengan suprastruktur (politik, budaya, hukum, dst.). Untuk memperkuat gagasan Talcot Parson terkait sistem sosial, dalam kaca mata materialisme bahwa evolusi sosial adalah sebuah proses perkembangan masyarakat yang menekankan pada komponen ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Pandangan materialisme dalam menerjemahkan perkembangan masyarakat tersebut tertuang dalam materialisme historis. Secara umum gagasan materialisme historis menekankan bahwa sistem ekonomi sebagai fondasi dasar atas sebuah sub-sistem di atasnya, sistem sosial, kebudayaan, hukum disebut juga teori bangunan rumah suprastruktur dan basis struktur. Secara harfiah, materialisme historis adalah sebuah teori penciptaan sejarah yang berlangsung secara alamiah, dapat diketahui dan terdapat hukumnya. Atau sederhananya adalah, materialisme historis adalah sebuah teori

multidimensional tentang sejarah yang melalui tiga tahapan berdasarkan tingkat individu, masyarakat dan negara. Materialisme historis terdiri dari tiga konsep yang saling berkelindan satu sama lain, ketiganya dikaitkan dengan hubungan interpretasi dan hubungan agregasi. Teori yang lebih rendah nantinya akan menjelaskan mekanisme teori di atasnya, dan teori yang lebih tinggi akan mengakumulasi kemungkinan dari gabungan ketiga teori tersebut. Teori ini bermula pada tindakan manusia, manusia pada dasarnya pasti akan selalu bertindak dan tindakan tersebut adalah sebuah aktivitas manusia. Aktivitas manusia berupa tindakan itu merupakan suatu proses bekerja karena penuh kesadaran, perencanaan, antisipasi. Aktivitas manusia yang didorong kekuatan dari dalam (tindakan) nantinya akan membentuk sebuah prinsip gerakan dengan ditandai oleh, dorongan kreatifitas dan vitalitas kreatif guna memerangi musuh, mengatasi keterbatasan dan menghadapi rintangan. (Fuadi ,223,2015,vol 17).

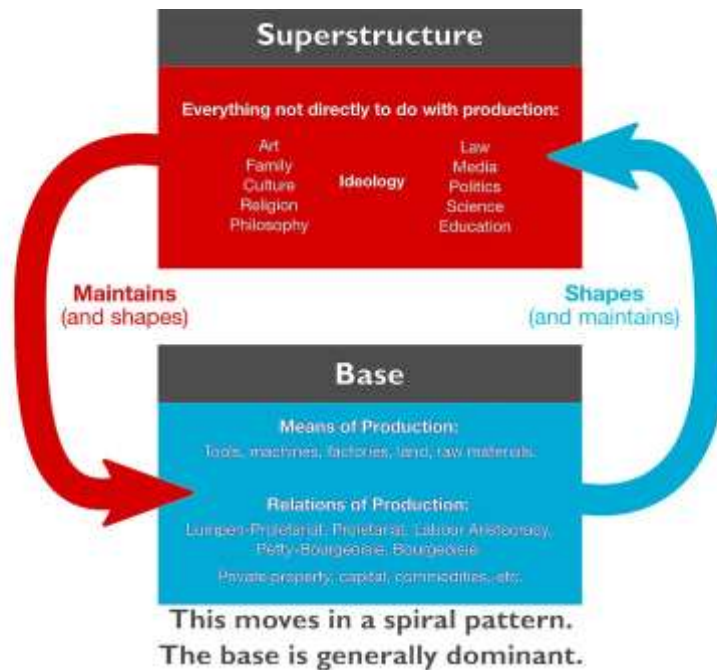
Jadi jelaslah sudah bahwa teori tingkat individu mencoba menjelaskan proses penciptaan sejarah yang dilakukan oleh individu tunggal melalui piranti berupa aktivitas manusia yang menginginkan adanya kebebasan berindividu secara mutlak. Contoh konkret dari teori tingkat individu adalah apabila anda kehabisan materi, secara otomatis anda harus bekerja untuk mengatasi keterbatasan materi tersebut. Kehabisan materi adalah kondisi keterasingan, bekerja adalah aktivitas manusia dan berkecukupan adalah simbol dan solusi keterbatasan anda pada hal materi. Selanjutnya menuju ke struktur teori yang lebih tinggi, yaitu teori struktur kelas. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa setiap tahapan dalam rekonstruksi teori ini akan selalu menjelaskan mekanisme

teori yang lebih tinggi. Adapun kata lain adalah perpanjangan dari teori yang sebelumnya.

Teori struktur kelas merupakan tahapan kedua dalam tiga bagian teori materialisme historis menurut Marx, teori struktur kelas ini mempunyai tujuan untuk menciptakan sosialisme yang ditandai dengan struktur masyarakat tanpa kelas yang adil dan merata. Lalu bagaimana awal mula proses itu terjadi?. Cikal bakal teori ini lahir dari individu yang khas seperti ketidakmampuan memiliki alat produksi: tanah, alat bangunan, kapital, bangunan mesin dan bahan mentah. Kesamaan kepentingan tersebut akan melahirkan sebuah ikatan sosial nantinya. Sesudah terbentuknya suatu ikatan sosial, maka ikatan-ikatan tersebut akan bertransformasi menjadi suatu kelas sosial yang berdasar pada kesamaan kepentingan. Kelas sosial tadi yang akan membentuk struktur sosial masyarakat menjadi dua kelas makro, yaitu kelas borjuis dan proletariat, kelas kaya dan miskin, kelas penindas dan tertindas. Kelas-kelas sosial yang sudah terbentuk tadi akan saling bertikai satu sama lain untuk memperjuangkan kepentingan dan *vested interest* mereka masing-masing, yang nantinya akan bermuara pada penghancuran bagi kelas yang kalah dan penerimaan sistem baru yang dikepalai oleh kelas yang menang. Singkatnya, teori struktur kelas bermula dengan adanya suatu kontradiksi kelas yang ditandai oleh tumbuh kembang nya kelas-kelas sosial, kemudian membesar menjadi antagonisme kelas akibat kelas sosial tersebut saling mencurigai karena memang ada perbedaan dalam proses penciptaan. Lalu diakhiri dengan perjuangan kelas dimana kelas sosial yang kalah akan menjadi budak dari kelas yang menang dan berhak menguasai struktur.

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/1823> [diakses tanggal 17 juni 2020]

Contoh nyata adalah munculnya klas buruh dan klas pemodal, yang kemudian lama kelamaan kedua kelas ini saling membenci karena perbedaan kepentingan. Yang pertama ingin memiliki alat produksi supaya mandiri, dan yang terakhir ingin tetap memperbudak pekerja supaya ia tetap untung dan lestari. Akhirnya percekcoakan pun tak terelakan, dan pertentangan itu dimenangkan oleh kelas pemodal yang mempunyai kapital lebih dengan dibantu oleh negara, karena menurut murid Marx, Lenin bahwa negara adalah alat penghisapan dari kelas penguasa. Sampai kepada tahapan paling adiluhung pada piramida teori Marx tentang penciptaan sejarah, yaitu teori formasi sosio-ekonomi. Teori formasi sosio ekonomi terjadi pada tataran kenegaraan, teori ini memiliki tujuan mulai untuk menciptakan komunisme dengan ciri melenyapkan kepemilikan pribadi dan negara. Hampir mirip dengan anarkisme gagasan Mikhail Bakunin. (Prasetyo dan Arif , 70:2004)



(Gambar 1.2.1 Base and Suprastruktur. <https://www.greelane.com/>)

Teori ini berawal dari perkembangan kekuatan produktif yang otodinamis dan terus menerus, perubahan tadi memicu timbulnya kontradiksi antara kekuatan produktif semisal kepemilikan alat produksi sudah dikuasai kelas proletariat. Kontradiksi tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah transformasi dalam format sosial, ekonomi bahkan politik. Transformasi tadi memungkinkan orde yang diubah tadi sesuai dengan keinginan kelas proletariat, transformasi tadi merupakan revolusi sosial yang mengubah format sosio-ekonomi suatu bangsa. Atau bisa juga ditafsirkan dengan revolusi sosial. (Santoso, 474-475: 2011)

Analogi nya adalah, teori formasi sosial ekonomi merupakan pengejawantahan dari lima formasi kehidupan yaitu komunitas primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme dan komunisme. Tumbang nya sistem feodalisme dengan kontradiksi internal antara beberapa kekuatan produktif,

sedangkan hancurnya kapitalisme tercermin pada transformasi sosial, dan komunisme berada dalam mahligai tertinggi pada revolusi sosial. Tahapan-tahapan dalam ketiga elemen materialisme historis tersebut mengajarkan kepada kita yang bebal dan banal ini bahwa proses penciptaan sejarah dilakukan oleh aktivitas manusia. Menurut Marx, sejarah merupakan proses akumulatif tindakan manusia. Yang dalam prakteknya membutuhkan aktor sejarah untuk mengontrol sejarah seperti keinginan mereka, dan kondisi struktural yang diwariskan dari generasi sebelumnya merupakan objek bagi kreativitas aktor sejarah yang bertugas merubah menjadi suatu produk baru.(Giddens, 1986).

Dalam materialisme historis juga mengungkap keterlibatan Hegel dan paham evolusionisme ihwal pembentukan materialisme historis. Menurut cara pandang teori ini, sejarah merupakan proses kemajuan secara terus menerus. Ini merupakan isu sentral dari pemikiran paham evolusionisme klasik sebenarnya. Adapun contoh lain, menurut dialektika Hegel bahwa proses sejarah selalu bermula dari prinsip negatif, seperti kontradiksi dan penderitaan. Ini sangat tercermin pada teori ini, manakala tiga tahapan teori materialisme historis Marx selalu berawal dari penderitaan. Dalam lingkup teori individu saja penderitaan tercermin pada keterasingan dalam masyarakat berkelas, teori struktur sosial memberi contoh nihilnya kepemilikan alat produksi sebagai perlambang penderitaan, teori formasi sosial ekonomi menjelaskan tidak adanya kekuatan produktif akibat penderitaan mendalam.

Dialektika Hegel tak berhenti sampai disitu, menurut Hegel proses penciptaan sejarah selalu dipengaruhi oleh kekuatan dari dalam yang berupa

semangat (*Geist*) yang menjadi penyebab transformasi dirinya sendiri. Dalam materialisme historis, semangat tersebut berwujud pada tindakan. Semangat untuk bertindak. Bisa diperhatikan dalam skup manusia dimana individu memiliki semangat untuk mengatasi keterbatasannya, lain lagi pada skup kelas yang melatarbelakangi semangat bertindak demi menguasai suatu sistem, atau pada skup formasi sosio ekonomi yang bertindak melalui semangat menguasai alat produksi negara.

2.3 TEORI SISTEM SOSIAL SETENGAH JAJAHAN – SETENGAH FEODAL

SJSf adalah suatu sistem sosial yang terbentuk dari sebuah keadaan masyarakat pada setiap fase perkembangan, maka dari itu perlu pemaparan dari komunal primitif hingga masyarakat kapitalistik.

a. Masyarakat Komunal *Primitive*

Disebut masyarakat komunal primitif karena sistem ekonominya bersifat komunal dan alat kerjanya masih primitif. Sistem ekonomi komunal primitif ialah sistem ekonomi yang alat produksinya milik komune, tujuan produksinya untuk kepentingan komune, dan hasil produksinya hanya cukup untuk kebutuhan pribadi saja. Makin banyaknya anggota kelompok dan berkembangnya teknologi (dengan ditemukannya logam) maka terjadilah persaingan dalam perebutan wilayah. Perbaikan alat produksi menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Pembagian pekerjaan dalam proses produksi mulai terjadi begitu pula system barter walau masih sangat sederhana sehingga mulai tercipta hubungan kerja.

Kebutuhan terus bertambah sesuai dengan perkembangannya. Hal ini mendorong warga kelompok bekerja lebih intensif meningkatkan produksinya untuk mencukupi kebutuhan. Hasilnya masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya bahkan dapat menyimpannya sebagai persediaan. Disamping itu timbul pula pikiran untuk melakukan perampasan terhadap pihak lain. Perkembangan tenaga produktif terus berjalan kontradiktif dengan hubungan produksi lama yang komunal primitif. Perkembangan itu tidak tercegah hingga hubungan produksi komunal primitif menjadi goyah.

b. Masyarakat Pemilikan Budak

Negara tidak selamanya ada. Negara baru muncul karena munculnya pertentangan yang tajam antar masyarakat, dan dimulai pada zaman perbudakan. Zaman perbudakan merupakan awal dari menajamnya pertentangan dalam masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal kelas, yaitu masyarakat komunal primitif (komunitas tradisional), sebuah masyarakat dimana setiap orang dipandang sejajar baik dalam hak maupun kewajiban. Proses perkembangan perdagangan dan *capital* di zaman kuno serta adanya hubungan antara pemilik alat-alat produksi dan kaum pekerja melahirkan perbudakan. Tuan budak memiliki sepenuhnya budak, bukan hanya tenaganya tetapi juga manusianya, karena itu budak boleh dijual bahkan dibunuh. Budak juga digunakan sebagai ukuran kekayaan oleh kaum-kaum tuan budak. Tuan budak merampas semua produksi dan hasil kerja budaknya. Budak yang bekerja diberi upah yang minim untuk mempertahankan tingkat kerjanya dan supaya tidak mati. Tidak ada batas waktu

jam kerja. Mereka bekerja dibawah ancaman cambuk dan pukulan mandor dan tukang pukul yang mengawasi pekerjaannya. Sedikit saja budak-budak itu dianggap teledor, tidak cepat, tidak cekatan, malas dsb, mereka terus saja dicambuk dan dipukul oleh mandor atau tukang pukul itu. Ekonomi dalam masyarakat pemilikan budak mengalami perkembangan maju sejalan dengan perkembangan tenaga kerja produktif. Juga kebudayaan, seni dan teknik mengalami perkembangan yang pesat dan menonjol. Ini terjadi dan dimungkinkan karena sudah lahir kelas yang berkesempatan untuk memikirkan dan berkepentingan akan hasil perkembangan kebudayaan, seni, dan teknik, yaitu kelas tuan budak.

Munculnya masyarakat berkelas pada zaman perbudakan, berikut kelas sosial dalam zaman perbudakan kelas *tuan budak dan budak*

c. Masyarakat Feodalisme

Hubungan produksi feodal terbentuk dan berlangsung sesuai dengan tuntutan perkembangan tenaga produktif sesuai bagi kelonggaran gerakannya. Sebagaimana budak yang merupakan tenaga kerja sebagai unsur tenaga produktif telah mendapat kebebasan dan kemerdekaan sesuai dengan tuntutannya. Budak yang kemudian menjadi tani hamba dalam hubungan produksi feodal, pada hakekatnya juga budak. Tapi bukan lagi budak yang boleh dibunuh dan dijual belikan seperti pada jaman pemilikan budak. Tani hamba bukan budak yang diikat dengan rantai dikakinya pada waktu sedang bekerja seperti pada jaman pemilikan budak. Dalam masyarakat feodal ditentukan oleh kepemilikan tanah. Hukum

ekonomi pokok feodalisme ialah pemilikan tanah oleh tuan feodal dan kerja tani hamba dalam ikatan tanah garapan milik tuan feodal dibawah syarat ketentuan dan kepentingan tuan feodal. Tanah-tanah dikuasai dan merupakan milik tuan feodal. Diatas tanah itulah tani hamba bekerja, hidup diikat dengan tanah garapannya oleh tuan feodal atas dasar ketentuan dan kepentingan tuan feodal. Tuan feodal kecuali pemilik dan penguasa tanah, juga penguasa dan pengendali pemerintahan negara. Dengan kekuasaannya itu tuan feodal menindas dan menghisap tani hamba serta menjaga keselamatan pemilikannya atas tanah dan kelangsungan penguasaannya atas tanahnya itu sebagai sumber pokok dan utama bagi pangan, kekayaan, dan biaya pemerintahan. Dengan begitu tani hamba benar-benar sangat sulit bisa hidup lepas dari ikatan penindasan dan penghisapan dalam hubungan produksi feodalisme. Tani hamba mengalami berbagai macam bentuk penindasan dan penghisapan feodalisme. Mereka bekerja menggarap tanah dengan hasilnya sebagian besar untuk tuan feodal, dan hanya sebagian sangat kecil untuk dirinya sendiri. Mereka bekerja di dua tempat atau di dua bagian tanah, yaitu diatas tanah tuan feodal dan diatas tanah garapannya sendiri. Untuk itu, waktu kerja mereka di bagi. Berapa hari dalam satu minggu atau berapa minggu dalam satu bulan, dan sebagainya. Mereka bekerja penuh diatas tanah tuan feodal. Kemudian sisa hari atau minggu sesudah bekerja diatas tanah tuan feodalnya, mereka bekerja diatas tanah garapannya sendiri dengan hasilnya semua untuk dirinya sendiri.

Dalam masyarakat feodalisme terdapat kelas sosial sebagai berikut *tuan tanah, dan buruh tani, tani miskin.*

d. Masyarakat Kapitalisme

Menurut Karl Marx kapitalisme adalah sistem sosio-ekonomi yang dibangun untuk mencari keuntungan yang didapat dari proses produksi, bukan dari dagang, riba, memeras, ataupun mencuri secara langsung, tetapi dengan cara mengorganisasikan mekanisme produksi tertentu sehingga mengurangi biaya produksi seminimum mungkin. Masyarakat pada masa kapitalis adalah masyarakat yang menghendaki kebebasan individu. Kapitalis mempekerjakan kaum buruh yang terpaksa menjual tenaganya karena tidak memiliki pabrik dan alat produksi lainnya, maka dalam sistem kapitalis terlihat adanya fenomena baru yaitu, hubungan produksi yang memungkinkan terus-menerus meningkatkan alat produksi, caranya adalah memperbaharui pabrik-pabrik, modernisasi mesin-mesin dengan menggunakan tenaga uap dan listrik. Akibat langsung dari sistem macam ini adalah kerja menjadi terspesialisasi, aktivitas persaingan mencari pasaran hasil produksi menjadi tugas utama kaum kapitalis, sedang pada saat yang sama upah dan kesejahteraan yang tidak kunjung datang menjadi dambaan kaum pekerja. Kapitalisme telah menyebabkan manusia sebagai pekerja, tidak lagi mempunyai control atas potensi yang terkandung dalam kerja mereka. Potensi ini, disebut Marx sebagai *labour power* (tenaga kerja), kepada kapitalis dipertularkan dengan benda abstrak yang terdapat dalam upah. Untuk mencapai nilai surplus dari produksinya, maka kapitalis memaksa para buruh untuk bekerja lebih lama dari seharusnya. Akibat dari tindakan kapitalis tersebut, menyebabkan para buruh mengalami keterasingan dalam kehidupannya. Masyarakat kapitalis adalah masyarakat penghisapan kaum kapitalis atas kerja kaum buruh atau

masyarakat kapital yang menghisap darah manusia dan masyarakat uang yang menimbun kekayaan serta masyarakat barang dagangan yang mengejar keuntungan. Kapital atau modal dalam masyarakat kapital adalah hubungan sosial dari suatu dominasi, suatu ungkapan tentang hierarki struktur kelas di masyarakat. Kapitalistik, uang dan barang dagangan itu bergerak dari nafas penghisapan atas kerja kaum buruh. Ketiga-tiganya merupakan tiga serangkai yang mempunyai peranan penting dalam gerak masyarakat dan kehidupan kapitalis yang hidup dari nafas penghisapan atas kerja kaum buruh. Sebab kapitalis tidak bisa hidup menghisap tanpa kapital dan tanpa peranan uang serta produksi barang dagangan.

Klass sosial dalam masyarakat kapitalisme : *klass borjuasi dan kelas proletar.*

www.ekonomikapitalis.com

e. Terbentuknya Masyarakat SJSF di Tiongkok

Perkembangan sejarah negara-negara Eropa yang sudah mulai membangun industri yang bercorak kapitalistik tidak serta merta adalah cermin dari negara-negara di wilayah belahan dunia lain, seperti Asia. Pada saat era industrialisasi dan sistem kapitalisme lahir dan berkembang di Eropa, Asia masih merupakan wilayah yang bercorak feodal bahkan perbudakan. Perbedaan perkembangan masyarakat ini dilatarbelakangi dari perkembangan internal masyarakatnya. Kemajuan teknologi yang berada di Eropa dengan ditemukannya

mesin uap tidak terjadi di wilayah Asia. Pola hubungan struktur ekonominya masih bercorak feodal, sementara secara politik negara-negara Asia masih terbelenggu dengan kekuasaan absolut dari kerajaan. Namun, yang menjadi catatan adalah bahwa Asia menjadi wilayah yang terdiri dari bangsa-bangsa yang cukup makmur meski industrinya belum tumbuh secara pesat. Perbedaan tahap perkembangan masyarakat inilah yang menjadikan negara-negara kapitalisme melakukan kolonisasi dan selanjutnya melakukan penjajahan dan penghisapan dinegara-negara yang masih bercorak feodal dan perbudakan.

Perkembangan dan kemajuan yang pesat atas negara-negara kolonial baik Eropa, Amerika, maupun Jepang terus melahirkan kontradiksi di dalamnya. Kontradiksi ini tentunya berlabuh pada kepentingan untuk mendominasi secara total negara jajahannya. Hal ini terjadi pula di Tiongkok yang telah menjadinegeri jajahan bagi banyak negara, termasuk Jepang. Jepang menguasai Tiongkok dengan lahirnya Perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895. Beberapa isi pokoknya adalah, mengakui kemerdekaan Korea, Menyerahkan beberapa semenanjung kepada Jepang, membuka lebih banyak kota pelabuhan untuk Jepang. Penindasan dan penghisapan yang dilakukan ini melahirkan Tiongkok sebagai negeri yang sama sekali tidak memiliki kedaulatan dalam menjalankan segala aktifitasnya.

Gerak sejarah masyarakat Tiongkok mencapai sedikit titik terang pada akhir kekaisaran Dinasti Qing. Perjuangan membangun negeri yang modern dan lebih demokratis serta terbebas dari segala bentuk penjajahan menjadi semangat perjuangan rakyat Tiongkok. Pada akhir tahun 1911 perjuangan untuk dan

menjatuhkan kekaisaran Dinasti Qing menemui momentum kemenangannya. Alhasil pada 1 Januari 1912 Dr. Sun Yat Sen diangkat menjadi Presiden Republik Tiongkok. Pascakemenangan perjuangan gerakan nasionalis pada revolusi 1911, Tiongkok berangsur membaik. Kepemimpinan Dr. Sun menjadi seperti setitik harapan bagi perubahan nasib rakyat di Tiongkok. Dr. Sun menjabat sebagai Presiden hanya untuk mengantarkan Tiongkok masuk ke dalam transisi dari kerajaan menuju Republik, begitu kekaisaran Dinasti Qing menyerah secara mutlak, maka Dr. Sun dengan demikian menanggalkan kekuasaannya. Kepemimpinan Dr. Sun digantikan oleh Yuan Shikai, yang kemudian memutar kembali Tiongkok menjadi negara yang tidak merdeka dan berdaulat. Berbeda dengan gaya kepemimpinan Dr. Sun yang demokratis dan menjunjung nilai humanis, Yuan lebih condong menggunakan cara-cara diktator.

Berakhirnya kekuasaan Yuan tidaklah lama pasca penetapannya sebagai kaisar Tiongkok, yaitu pada 6 Juni 1916. Kekuasaan Tiongkok pasca Yuan beralih ke tangan Li Yuanhoang. Parlemen kembali dipulihkan fungsinya pada masa ini. Pada masa kepemimpinan Presiden Li muncul konflik internal dari kelompok-kelompok kepentingan di Tiongkok. Kelompok yang berkonflik ini disebut dengan Gubernur Militer/Penguasa Perang (*Warlord*). Zaman *Warlord* ini menjadikan Tiongkok seperti layaknya negeri perang, artinya selama masa ini perang terus berkecamuk di dalam negeri. Perang antar penguasa perang ini terusterjadi demi memperebutkan kekuasaan dan memperluasnya. Dalam hal ini, keberadaan *Warlord* secara konkret menegaskan kekuasaan pemerintah pusat. Perang dalam

negeri ini terus terjadi sampai proses penyatuan yang dilakukan oleh pemerintahan pimpinan Chiang Kai Sek. (Mao 43:1957)

Pemerintahan Tiongkok Pimpinan Chiang Kai Sek walaupun telah menghancurkan *Warlord*, namun kemudian pemerintah baru tersebut membuat kondisi di mana berkembang raja-raja perang baru. Kekuasaan Chiang Kai Sek juga secara bertahap telah menyerahkan Tiongkok kepada kepentingan imperialisme. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Mao Tse Tung bahwa kekuasaan yang dibangun oleh Chiang Kai Sek dan Koumintang telah membentuk Warlord baru dan menyerah kepada kepentingan para imperialis, sementara penghisapan ekonomi dan penindasan politik kepada kelas buruh dan kaum tani semakin kejam. Penindasan dan penghisapan yang dilakukan oleh Chiang Kai Sek merupakan manifestasi dari pemerintahan yang tetap mempertahankan kepentingan imperialisme. Masuknya imperialisme ke Tiongkok tentunya telah berjalan semenjak dinasti Qing. Keberadaan imperialisme dalam bentuk negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Rusia, Serta Amerika Serikat dan Jepang telah mengakar kuat dalam segi politik, ekonomi, dan budaya di Tiongkok. Perjuangan revolusi borjuis pada tahun 1911 dan penyatuan Tiongkok di bawah Chiang Kai Sek tidak juga menghilangkan dominasi dari imperialisme terhadap Tiongkok. Sementara hadirnya imperialisme justru terus ditopang oleh tuan-tuan tanah besar Tiongkok yang menjadi basis sosial bagi imperialisme. Kolaborasi yang terjadi antara imperialisme dan feodalisme dengan topangan dari pemerintah dalam negeri pimpinan Chiang Kai Sek inilah yang

menjadikan Tiongkok sebagai negara setengah jajahan setengah feodal. Mao (79:1951)

Dalam melakukan analisis kelas dalam masyarakat Tiongkok, Mao memulainya dengan kelas Tuan Tanah Besar dan Borjuasi Besar Komprador. Dalam analisisnya, Mao menekankan bahwa kedua kelas ini adalah perpanjangan tangan dan penopang utama keberadaan imperialisme untuk menghisap dan menindas. Kolaborasi antara imperialisme dan Tuan Tanah Besar yang berwatak komprador inilah yang menjadikan Tiongkok sebagai negeri yang berkarakter setengah jajahan setengah feodal. Dalam negeri Tiongkok, latar belakang ekonomi kelas-kelas ini mewakili kelas yang melakukan monopoli terhadap alat produksi, sehingga menghambat perkembangan tenaga produktif masyarakat Tiongkok. Hal ini menyebabkan kelas ini adalah kelas yang paling kontra terhadap perjuangan revolusioner rakyat Tiongkok.

Borjuasi Sedang adalah kelas yang memiliki kebimbangan terbesar dalam menentukan sikapnya pada revolusi. Hal ini dikarenakan posisinya yang terhimpit oleh dua kekuatan besar yaitu kekuatan perjuangan kelas yang dilakukan oleh rakyat dan kekuatan imperialisme bersama tuan tanah besar yang ingin mempertahankan dominasinya. Borjuasi Sedang utamanya adalah kelas yang mewakili berlangsungnya sistem kapitalisme baik di desa maupun perkotaan.

Selain Borjuasi Sedang, dalam masyarakat Tiongkok juga terdapat kelas Borjuasi Kecil. Borjuasi Kecil merupakan kelas yang terdiri dari beberapa golongan masyarakat. Golongan yang masuk dalam kelas Borjuasi Kecil antara lain adalah Tani Pemilik, pengusaha rumahan, intelektual lapis bawah atau pelajar

dan mahasiswa, guru sekolah, pegawai negeri rendahan, pedagang kecil, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Borjuasi Kecil tidak serta-merta sama kondisi ekonomi dan sikapnya pada revolusi. Menurut pandangan dan analisis Mao, dalam masyarakat Tiongkok terdapat tiga golongan Borjuasi Kecil. Pertama, Golongan ini adalah Borjuasi Kecil yang memiliki kelebihan dalam pendapatannya baik dari hasil kerja badan maupun otaknya.

Kelas selanjutnya dalam masyarakat Tiongkok adalah Semi Proletar. Semi Proletar maksudnya adalah kelas yang hanya memiliki alat kerja ataupun sasaran dan modal yang sangat sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mao membagi Semi Proletar dalam lima golongan utama, atau yang paling mayoritas dalam masyarakat Tiongkok, yaitu Tani Setengah Pemilik, Tani Miskin, Pengrajin Kecil, Pegawai Toko, dan Penjaja. Dalam hal ini, mayoritas dari kelas Semi Proletar di Tiongkok adalah Tani Setengah Pemilik dan Tani Miskin. Tani Setengah Pemilik adalah kaum tani yang memiliki tanah yang dapat digunakan untuk memenuhi kurang lebih setengah dari kebutuhan hidupnya. Sedangkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, Tani Setengah Pemilik harus menyewa tanah dari tuan tanah, menjual tenaga kerjanya, atau berdagang. Pada masa „paceklik“ atau saat dilanda gagal panen, Tani Setengah Pemilik terpaksa akan meminjam uang dan dengan demikian terus terlilit hutang yang besar.

Dalam masyarakat Tiongkok yang setengah jajahan setengah feodal, tentunya sektor-sektor pertokoan hingga usaha kecil seperti penjaja berkembang cukup besar. Dalam hal ini, karakter negeri setengah jajahan yang didominasi oleh imperialisme juga mensyaratkan lahirnya kelas yang paling baru, yaitu kelas

Proletariat. Klas Proletariat adalah kelas buruh modern terutama yang bekerja dilingkungan pabrik-pabrik industri Tiongkok. Klas Proletariat adalah kelas yang paling merasakan dampak dari penghisapan dan penindasan yang dilakukan oleh imperialisme. Proletariat adalah masyarakat yang hanya memiliki tenaga untuk dijual dengan imbalan upah, artinya Proletariat adalah kelas yang tidak memiliki alat produksi. Dalam masyarakat Tiongkok, jumlah klas Proletariat sebesar dua juta jiwa. Mao (16:1951). Dalam relasi sistem setengah jajahan setengah feodal juga terdapat satu kelas yang tidak terikat secara hubungan produksi, dia juga bergantung pada keadaan kedermawaan dari kapitalis birokrat, tuan tanah. Karena hubungan produksi yang seperti itu maka mereka banyak menjadi kriminal, dan hal-hal cenderung premanisme.

F. Terbentuknya Sistem Sosial SJSF dalam Masyarakat Indonesia

Sesungguhnya peralihan hubungan produksi setengah feodal dan jajahan dari feodal dan jajahan dibagi dua tahap. Tahap pertama Pada tahun 1870-1990 ini dikarenakan kapitalisme belum mencapai puncak menjadi imperialisme. Sedangkan tahap kedua yaitu jajahan dan feodal terjadi pada 1900-1945, yang dimana kapitalisme sudah mencapai titik puncaknya yaitu imperialisme dan mendominasi hubungan produksi feodalisme. Karena feodalisme sangat menguntungkan bagi pihak imperialisme sebagai penyuplai bahan mentah dan ini menjadi alasan pokok kenapa feodalisme di Indonesia hingga kini masih ada.

a). **Fase 1870-1900**

Sistem Tanam Paksa dinyatakan berakhir dan kemudian digantikan dengan dikeluarkan undang-undang agraria kolonial: *Agrarische wet* de Waal (de Waal adalah menteri urusan jajahan saat itu). Akan tetapi, tidaklah benar bahwa sistem tanam paksa diakhiri karena perdebatan parlemen antara kaum liberal dengan kalangan konservatif, melainkan karena perlawanan dan pemberontakan rakyat yang telah meledakkan sekaligus menghancurkan keuntungan yang sedang dibangun, karena penindasan dan penghisapan diluar batas. Para kaum liberal tidak pernah peduli akan nasib penduduk jajahan. Hal ini terbukti ketika mereka mulai masuk ke Indonesia dan menguasai pabrik-pabrik gula, perkebunan dan pertanian pada umumnya, penindasan tidak berkurang akan tetapi justru semakin bertambah, karena semakin banyaknya para tuan tanah dan bangsawan pada umumnya yang direkrut menjadi bagian dari pemerintahan kolonial. Dan ini menjadi cikal bakal munculnya hubungan produksi setengah feodal yang melahirkan komprador dan kapitalis birokrat.

Politik Etis yang dikemudian hari dikenal sebagai politik “balas budi” pada prinsipnya adalah upaya untuk mengukuhkan kekuasaan politik mereka. Khususnya program pendidikan untuk kalangan priyayi bertujuan untuk mengefisienkan birokrasi, sementara irigasi pada dasarnya hanyalah untuk melayani kemajuan industri gula dan perkebunan pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah, sedangkan transmigrasi jelas hanya untuk mobilisasi tenaga kerja murah dengan cara membuka lahan baru untuk perkebunan.

b). Fase 1901-1945

Agrarische wet de Waal mulai dijalankan sejak tahun 1870 dengan azas *Domeinverklaring* yang isi pokoknya: “semua tanah yang tidak terbukti dimiliki dengan hak eigendom adalah kepunyaan negara”. Undang-undang ini pada hakekatnya adalah pengakuan terhadap hak milik perseorangan (eigendom) dengan memberikan sertifikat terhadap tanah garapan sebagai perlindungan hukum. Di sisi lain, tanah-tanah yang tidak digarap adalah tanah milik negara, dalam hal ini pemerintahan kolonial. Tanah inilah yang kemudian diberikan kepada para investor asing, dan juga mereka dijamin haknya untuk menyewa tanah-tanah milik penduduk sekaligus dapat menjadi buruhnya. Koneksi yang diberikan oleh pemerintah kolonial kepada para investor tersebut lagi-lagi telah mengakibatkan rakyat kehilangan tanah secara besar-besaran. Masuknya kapitalis selain belanda berarti menunjukkan bahwa kapitalisme sudah mencapai puncak tertinggi yaitu imperialisme.

Sementara perkembangan lainnya adalah berdirinya beberapa bank di tanah jajahan yang dipelopori oleh perubahan status NHM yang dulunya adalah perusahaan monopoli dagang dan jasa pengangkutan barang dagangan menjadi bank yang mendukung perluasan pabrik gula dan perkebunan komoditi lainnya. Dukungan kapitalis finance ini telah mengakibatkan semakin luasnya ranah usaha kaum kapitalis di Indonesia. Mereka mulai merambah pertambangan minyak, batu bara. Perusahaan pertambangan minyak seperti BPM milik Inggris dan Shell milik

AS mulai melakukan eksplorasi demikian juga dengan pertambangan timah di Bangka-Belitung, yang sebenarnya sudah dimulai sejak VOC.

Akibat perampasan tanah secara besaran-besaran tersebut, dan seiring dengan semakin banyaknya industri-industri yang berdiri sebagai dampak dari masuknya investasi akibat dijalankannya kebijakan Agrarische Wet, telah mendorong lahirnya kelas buruh sebagai kelas baru dalam masyarakat Indonesia. Sementara pelaksanaan kebijakan politik etis sebagai bagian dari kebijakan Agrarische Wet, telah berpengaruh pada pembentukan kelas borjuasi kecil perkotaan, seperti: produsen kecil, pedagang, kaum intelektual, pekerja merdeka (wartawan, pengacara, guru, dokter), pegawai rendah pemerintahan. Dengan demikian, kelas buruh dan kelas borjuis adalah kelas baru dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kelas buruh dan kelas borjuis dalam masyarakat Indonesia, tidak lahir dari revolusi borjuis tipe lama sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Eropa, peralihan dari masa feodalisme menuju kapitalisme. Ini dikarenakan hubungan produksi yang mendominasi adalah perpaduan dari feodalisme dan kolonialisme Belanda yang juga memberikan kesempatan bagi kapitalis dari negara-negara lainnya seperti Inggris dan AS. Wacziarg (1956: 57)

Sejak dijalankan sistem tanam paksa dan kebijakan Agrarische Wet, kedudukan Indonesia sebagai tanah jajahan adalah penyedia bahan baku atau mentah bagi kepentingan kolonial dan borjuis, sebagai pasar penjualan industri Eropa, sebagai sumber tenaga kerja murah, dan sasaran investasi negara-negara kapitalis lainnya. Penindasan yang sangat kejam tersebut, dijawab dengan perlawanan yang tiada putus-putusnya oleh kaum buruh, kaum tani dan beberapa

kalangan terpelajar yang mulai terbit kesadarannya akan nasib rakyat yang tertindas. Organisasi rakyat yang modern mulai bermunculan di mana-mana. Mereka mulai mengorganisir diri untuk melawan para imperialis asing maupun kalangan pribumi sendiri yang menjadi antek mereka dalam mengeruk keuntungan atau nilai lebih. Akan tetapi organisasi rakyat yang terbentuk tidak selalu melawan kaum imperialis secara langsung akan tetapi terkadang mereka hadir hanya untuk menangani beberapa persoalan yang tengah dihadapi. Dalam perkembangannya, karena kesadaran anggota yang berada di tengah-tengah penderitaan rakyat yang terus bertambah dari hari ke hari pada akhirnya organisasi tersebut memilih jalan perjuangan melawan Imperialisme.

Patut diingat perubahan fase perpaduan antara feodalisme dengan kolonialisme menjadi hubungan setengah feodalisme dengan kolonialisme adalah mulai lahirnya klas-klas penguasa baru yaitu borjuasi komprador yang tadinya tuan tanah besar lokal dan memiliki hubungan sama dengan hal kapitalis birokrat (ass Residen wedana dsbnya) yaitu untuk memenuhi kepentingan imperialis dalam hal pemenuhan bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar.

g. Rakyat Indonesia Pada Masa Setengah Jajahan dan Setengah Feodal

(1949– Sekarang)

Revolusi Borjuis Agustus 1945 adalah puncak dari pergolakan yang membakar kesadaran massa rakyat sejak awal abad ke-17, dan pergolakan yang paling massif sejak awal abad 20. Rakyat Indonesia berhasil mengusir penjajahan langsung atau menghancurkan pemerintahan jajahan yang ada di Indonesia. Akan tetapi gagal membebaskan diri sepenuhnya dari cengkeraman Imperialis, karena

masih bercokolnya kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik mereka di Indonesia, terutama melalui komprador-kompradornya di dalam negeri.

Indonesia resmi menjadi negara Setengah Jajahan melalui kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 yang ditandatangani oleh Hatta dan Sjahrir. Melalui KMB tersebut, imperialisme menemukan klik reaksioner dalam negeri yang memberikan banyak keuntungan secara ekonomi, politik dan kemiliteran bagi imperialisme serta menimbulkan kerugian di pihak rakyat Indonesia. Secara ekonomi, perjanjian KMB telah memberikan jaminan terhadap keberlangsungan kepentingan-kepentingan imperialisme di Indonesia, terutama dari upaya-upaya nasionalisasi. Secara politik, perjanjian KMB telah menempatkan Indonesia sebagai anggota negara persemakmuran di bawah kaki imperialisme Belanda. Demikian pula secara kemiliteran, imperialisme mendapatkan keuntungan karena tidak harus berhadap-hadapan secara langsung dengan kekuatan bersenjata rakyat yang akan memakan biaya dan menimbulkan kerugian besar di pihak mereka. Dominasi imperialis di Indonesia melahirkan klas borjuis besar komparador, klas borjuis perpanjangan tangan yang dengan setia melayani kepentingan imperialis.

Demikian pula Revolusi Agustus 1945 gagal menghancurkan kekuatan feodalisme. Justru feodalisme lah yang menjadi basis sosial bagi imperialis agar bisa mempertahankan syarat-syarat hidupnya yaitu tersedianya bahan mentah untuk industri mereka. Persekutuan antara imperialisme dan feodalisme telah melahirkan pemerintahan diktator bersama, klas borjuis komparador yang juga tuan tanah besar yang sedang setia melayani kepentingan imperialisme. Soeharto

adalah rejim pertama yang menjadi pemerintahan diktator bersama antara kelas borjuis besar komparador dan tuan tanah besar lainnya. Dan pasca rezim Soeharto pun, sistem setengah feodal dan setengah jajahan masih berlangsung.

Sebagai negara setengah jajahan dan setengah feodal, Indonesia memiliki kedudukan sebagai penyedia kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja murah bagi kepentingan industri imperialisme, sebagai sasaran proyek investasi raksasa imperialis, dan sebagai pasar bagi hasil produksi imperialis. Dan patut diingat pula, lahirnya perpaduan hubungan produksi setengah jajahan dan setengah feodal, ditandai adanya rezim boneka yang menjamin keberlangsungan pasokan bahan mentah, tenaga kerja murah dan pasar pada suatu negara setengah jajahan seperti hal Indonesia.

<http://bprfmn-unhas.blogspot.com/2013/10/masyarakat-indonesia-setengah-jajahan.html>

F. Media Film Sebagai Cermin Realitas Sosial

Fenomena perkembangan film yang begitu cepat dan tak terprekdisikan membuat film kini disadari sebagai fenomena budaya yang progresif. Bukan saja oleh negara-negara yang memiliki industri film besar, tapi juga oleh negara-negara yang baru akan memulai industri filmnya.

Dalam sejarah perkembangan film terdapat tiga tema besar dan satu atau dua tonggaksejarah yang penting (McQuail, 1987:13). Tema pertama ialah pemanfaatan film sebagai alat propaganda. Tema ini penting terutama dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan aslinya dan masyarakat. Hal tersebut berkenaan dengan pandangan yang menilai bahwa film memiliki

jangkauan, realisme, pengaruh emosional, dan popularitas yang hebat. Kedua tema lainnya dalam sejarah film ialah munculnya beberapa aliran seni film (McQuail, 1987:51) dan lahirnya aliran film dokumentasi sosial. Kedua kecenderungan tersebut merupakan suatu penyimpangan dalam pengertian bahwa keduanya hanya menjangkau minoritas penduduk dan berorientasi ke realisme. Terlepas dalam hal itu, keduanya mempunyai kaitan dengan tema “film sebagai alat propaganda”.

Sebagai komunikasi massa, film dimaknai sebagai pesan yang disampaikan dalam komunikasi filmis yang memahami hakikat, fungsi dan efeknya. Sedang dalam praktik sosial, film dilihat tidak sekedar ekspresi seni pembuatnya, tetapi interaksi antar elemen-elemen pendukung, proses produksi, distribusi maupun eksebisinya, bahkan lebih jauh dari itu, perspektif ini mengasumsikan interaksi antara film dengan ideologi serta kebudayaan dimana film diproduksi dan dikonsumsi. Turner dalam Maarif (2005:11) mengatakan bahwa film tidak mencerminkan atau merekam realitas sebagai medium representasi yang lain, ia mengkonstruksi dan menghadirkan kembali gambaran dari realitas melalui kode-kode, konvensi-konvensi dan ideologi kebudayaannya. Seperti halnya media komunikasi massa yang lain, film terlahir sebagai sesuatu yang tidak bisa lepas dari akar lingkungan sosialnya.

Media massa merupakan sebuah bisnis, sosial, budaya, sekaligus merupakan sebuah politik. Dalam konteks hubungan media dan publik, seperti halnya media massa yang lain, film juga menjalankan fungsi utama media

massa seperti yang dikemukakan oleh Laswell dalam (Mulyana, 2007:37) sebagai berikut: a. *The Surveillance of the environment*. Artinya media massa mempunyai fungsi sebagai pengamat lingkungan, yaitu sebagai pemberi informasi tentang hal-hal yang berada di luar jangkauan penglihatan masyarakat luas. b. *The correction of the parts of society to the environment*. Artinya media massa berfungsi untuk melakukan seleksi, evaluasi dan interpretasi informasi. Dalam hal ini peranan media adalah melakukan seleksi mengenai apa yang pantas dan perlu untuk disiarkan. c. *The transmission of the social heritage from one generation to the next*. Artinya media merupakan sarana penyampaian nilai dan warisan sosial budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. Fungsi ini merupakan fungsi pendidikan oleh media massa.

G. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan analisis semiotika yang dipopulerkan oleh Roland Barthes. Roland Barthes melontarkan konsep tentang konotasi dan denotasi sebagai kunci dari analisisnya. Sebab kenapa penulis menggunakan analisis semiotik Roland Barthes, karena Barthes menggunakan versi yang jauh lebih sederhana saat membahas model glossematis sign (tanda-tanda glossematis). Mengabaikan dimensi dari bentuk dan substansi, Barthes mendefinisikan sebuah tanda (*sign*) sebagai suatu sistem yang terdiri dari (E) sebuah ekspresi atau signifier dalam hubungannya (R) dengan *content* (atau *signified*) (C): ERC.

Barthes menulis: *Such sign system can become an element of a more comprehensive sign system. If the extension is one of content, the primary sign*

(E1R1C1) *becomes the expression of a secondary sign system: E2 = (E1R1C1) R2C2* Dengan begitu, *primary sign* adalah *denotative* sedangkan *secondary sign* adalah satu dari *connotative semiotics*. Konsep *connotative* inilah yang akan menjadi kunci penting dari model semiotika Roland Barthes (Wibowo, 2013: 21).

Denotasi adalah tatanan pertandaan pertama dalam landasan kerja Saussure. Tatanan ini menggambarkan relasi antara penanda dan petanda dalam tanda, dan antara tanda dengan referennya dalam realitas eksternal. Konotasi menggambarkan interaksi yang berlangsung tatkala tanda bertemu dengan perasaan atau emosi penggunanya dan nilai-nilai budayanya (Fiske, 2007: 118).

Dalam penelitian semiotika, barthes menciptakan peta tentang bagaimana tanda bekerja :

1. Signifier (penanda)	2. Signified (petanda)	
3. Denotative sign (tanda denotatif)		
4. Connotative signifier (penanda konotatif)		5. Connotative signifier (penanda konotatif)
6. Connotative sign (tanda konotatif)		

Tabel 3.1. Peta Tanda Roland Barthes

(Sumber : Paul Cobley & Litza Jansz. 1991. *Introduction Semiotics* . NY: Totem Bookshlm.52, dalam dari Sobur, 2003: 69)

Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif (4). Dengan kata lain, hal tersebut merupakan unsur material: hanya jika Anda mengenal tanda „sing”, barulah konotasi seperti harga diri, kegarangan, dan keberanian menjadi mungkin (Cobley dan Jansz, 1999:51, dalam Sobur, 2003:69).

Konotasi bekerja dalam tingkat subjektif sehingga kehadirannya tidak disadari. Pembaca mudah sekali membaca makna konotatif sebagai fakta denotatif. Karena itu, salah satu tujuan analisis semiotika adalah untuk menyediakan metode analisis dan kerangka berpikir dan mengatasi terjadinya salah baca atau salah dalam mengartikan makna suatu tanda (Wibowo, 2013:22). Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi, yang disebutkan sebagai “mitos”, dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu (Budiman, 2004: 28).

Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda, namun sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya atau, dengan kata lain, mitos adalah juga suatu sistem pemaknaan tataran ke-dua. Di dalam mitos pula sebuah sistem pemaknaan dapat memiliki beberapa petanda. Denotasi adalah hubungan yang digunakan di dalam tingkat pertama pada sebuah kata yang secara bebas memegang peranan penting dalam ujaran.

Makna denotasi bersifat langsung, yaitu makna khusus yang terdapat dalam sebuah tanda dan pada intinya dapat disebut sebagai gambaran sebuah petanda (Sobur, 2009: 263). Konotasi menggambarkan interaksi yang berlangsung tatkala tanda bertemu dengan perasaan atau emosi penggunanya dan nilai-nilai kulturalnya (Fiske, 2007: 118).